



Laporan Penelitian

**PENELITIAN TENTANG
TINGKAT KEDISIPLINAN ANAK
DI PEMUKIMAN KUMUH
SEMARANG**

Oleh

**Drs. Mudjahirin Thohir, M.A.
Drs. Eko Punto Hendro, M.A.
Triyono Lukmantoro, S.Sos
Ir. Edy Priyanto, CES
Drs. Zaenal Abidin**

Dibiayai oleh DIK Rutin Universitas Diponegoro,
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Tanggal 4 Agustus 1997
Nomor: 3157/PT09.H2/N/1997

**PUSAT PENELITIAN SOSIAL BUDAYA
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Tahun 1997/1998**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

Judul Penelitian	:	PENELITIAN TINGKAT KEDISIPLINAN ANAK DI PEMUKIMAN KUMUH SEMARANG
Bidang Ilmu	:	Ilmu Sosial
Kategori Penelitian	:	II (Penelitian untuk Menunjang Pembangunan)
Ketua Peneliti	:	
a. Nama	:	Drs. Mudjahirin Thohir, M.A.
b. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
c. Gol. Pangkat/NIP	:	III-D/Penata Tk.I/131 124 440
d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Madya
e. Jabatan Struktural	:	-
f. Fakultas/Jurusan	:	Sastra/Indonesia
g. Pusat Penelitian	:	Puslit Sosial Budaya Lemlit Undip
Susunan Peneliti	:	
a. Ketua Peneliti	:	1 orang
b. Anggota	:	4 orang
Lokasi Penelitian	:	Kodya Dati II Semarang
Lama Penelitian	:	6 (enam) bulan
Biaya Penelitian	:	Rp. 3.000.000,- (<i>tiga juta rupiah</i>)
Sumber Biaya	:	Dana DIK Anggaran Rutin Undip Tahun 1997/1998

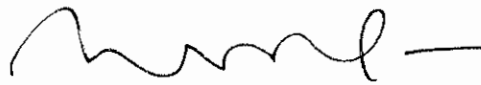
Semarang, 20 Februari 1998

Mengetahui,
a.n. Kapuslit Sosial Budaya,
Sekretaris,



Dr. AM. Djulianti Suroyo
NIP. 130 516 885

Ketua Peneliti,



Drs. M. Mudjahirin Thohir, M.A.
NIP. 131 124 440



Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Prof. Dr. dr. H. Satoto
NIP. 130 368 480

Ringkasan

TINGKAT KEDISIPLINAN ANAK DI PEMUKIMAN KUMUH SEMARANG

Drs. Mudjahirin Thohir, M.A.

Pusat Penelitian Sosial Budaya - Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro Semarang

Pengertian disiplin seringkali dikacaukan dengan pengertian tertib. Meskipun keduanya sama-sama menunjukkan keberaturan, namun muatan geneologisnya berbeda. Kalau disiplin adalah perilaku manusia yang muncul atas dasar justifikasi moralitas, ini berarti, disiplin merupakan hasil proses kebudayaan (*civitas dei*), maka sebaliknya, tertib adalah perilaku manusia yang dibangun atas dasar justifikasi kemasyarakatan. Dengan demikian ketertiban adalah produk peradaban (*civitas solis*) atau hasil kontrak sosial dalam kebersamaan (*communion*).

Secara filosofis, perilaku disiplin muncul karena hasil proses penyadaran dan kesadaran yang hakiki melalui proses perenungan kemanusiaan sehingga mustahil jika dalam komunitas 'religius' muncul perilaku tidak disiplin. Sebaliknya, perilaku tertib adalah hasil proses intelektualitas manusia melalui proses dialektika pikir: tesis, sintesis dan antitesis, untuk mengatur hubungan kemasyarakatan yang mengandung dimensi sosiologis bukan humanitis.

Maka dari itu, sanksi yang diberikan pada mereka yang tidak disiplin biasanya merupakan sanksi moral lantaran mereka melanggar kaidah moralitas bukan sanksi hukum. Sebaliknya pada mereka yang tidak tertib diberikan sanksi hukum karena mereka melawan kontrak-kontrak sosial yang telah disepakati bersama sebagai *rule of the game* dalam kemasyarakatan.

Persoalannya, apakah proses kesadaran dan penyadaran manusia untuk menghasilkan perilaku disiplin juga dipengaruhi oleh faktor ekologis atau tata ruang kewilayahan di mana mereka tinggal. Pertanyaan demikian penting untuk disampaikan, lantaran konsep disiplin sekarang ini cenderung berkembang memiliki cakupan amat luas, meliputi disiplin dalam dimensi ekonomi, politik, agama, pendidikan, dan lain-lain. Bahkan, karena begitu pentingnya arti kedisiplinan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian dicanangkan GDN (*Cerakan Disiplin Nasional*) oleh negara.

Para teoritis penganut aliran psikologi behavioristik sebagian besar berpendapat sama bahwa proses penyadaran dan kesadaran manusia itu sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (fisik dan sosial) di mana mereka tinggal. Argumentasinya, dalam proses penyadaran dan kesadaran itu sedikit banyak juga melakukan proses komunikasi, menghubungkan realitas sosial dengan kehendak moralitasnya. Ini berarti, hasil proses penyadaran dan kesadaran itu memiliki variasi dalam kualitasnya.

Penelitian ini tidak membuktikan asumsi di atas bahwa kekumuhan (fisik dan sosial) yang merupakan dimensi ekologis dan arsitektural kewilayahan pada kenyataannya bukanlah

merupakan faktor penyebab munculnya perilaku tidak disiplin.

Melalui metoda eksplanatori yang serba terbatas menemukan bahwa sekalipun anak-anak tinggal di wilayah yang kumuh didukung pekerjaan, pendidikan dan penghasilan orang tuanya yang rendah, tetap saja menunjukkan mereka berperilaku disiplin. Anak berperilaku disiplin pada kenyataannya tidak ditentukan oleh bekerjanya variabel-variabel tersebut, tapi melalui proses internalisasi yang berlangsung dalam keluarga. Selama orang tua sekalipun rendah dalam pendidikan, penghasilan, dan berpekerjaan tidak menentu, tapi ia bersedia memberikan contoh perilaku yang baik dalam kesehariannya (perhatikan etos: *ing ngarsa sun tulada*), maka inilah yang mempengaruhi proses pembentukan kesadaran untuk berperilaku disiplin.***

KATA PENGANTAR

Penelitian ini sudah lama kami angan-angankan pelaksanaannya, bahkan sampai di pertengahan tahun 1997 terus mengusik pikiran kami hingga terobsesi mengangkat tema ini menjadi obyek kajian penting di Puslit Sosial Budaya Lemlit Undip. Persoalan budaya kota dengan segala macam atributnya: individualitas, kekumuhan, agresifitas, kasar, bengis, dll, kira-kira yang mengantarkan tema ini relevan dimasukan dalam agenda riset di tahun 1997.

Namun, sekalipun obsesi itu lama-lama bisa membumbung setinggi langit, yang pasti jika tanpa bantuan dari berbagai pihak, sudah barang tentu kami tidak mungkin bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini, iijinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, *pertama* kepada Prof. Dr. H. Muladi, SH, rektor Undip yang telah memberikan ijin pelaksanaan penelitian melalui DIK anggaran rutin Undip tahun 1997/1998. *Kedua*, kepada Prof. Dr. dr. H. Satoto, ketua Lemlit Undip, yang bersedia menyetujui tema ini menjadi topik penelitian dalam agenda riset dengan dana rutin tahun 1997/1998.]

Juga kepada para narasumber yakni para kepala rumah tangga di kelurahan Krobokan Semarang; rekan-rekan peneliti utama: Triyono, Tyas, Ery, dan lain-lain yang amat tekun kerja bareng menyelesaikan laporan penelitian ini. Atas terselesaikannya kerja kita, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga jerih payah kita bermanfaat untuk semuanya.

Semarang, 20 Februari 1998

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Lembar identitas dan pengesahan laporan akhir hasil penelitian	ii
Ringkasan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kontribusi Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Hipotesis Penelitian	8
G. Metode Penelitian	8

Bab II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Latar Belakang Geografis	10
B. Latar Belakang Demografis	13

Bab III TEMUAN-TEMUAN PENELITIAN

A. Karakteristik Responden	19
B. Status Sosial Ekonomi Orang Tua	22
C. Kedisiplinan Anak Di Rumah	25
D. Kedisiplinan Anak Di Sekolah	33

Bab IV DISKUSI TEMUAN-TEMUAN PENELITIAN

A. Pengantar	39
B. Diskusi	40

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Implikasi Kebijakan	45

DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

"Perilaku disiplin, cermin budaya bangsa", adalah serentetan narasi dalam iklan layanan masyarakat yang berulang kali menghiasi layar kaca televisi. Tidak mengherankan apabila muncul dugaan bahwa persoalan pendisiplinan mejadi wacana penting masa kini. Bahkan, tidak tanggung-tanggung dalam tayangan iklan layanan masyarakat tersebut divisualisasikan bagaimana Presiden Soeharto memukul gong tanda Gerakan Disiplin Nasional (GDN) mulai dicanangkan.

Secara berulang-ulang akan mudah disaksikan bagaimana ajakan melakukan gerakan disiplin selalu ditanamkan. Misalnya dalam hal budaya antre harus menjadi suatu kebiasaan. Atau, dapat juga dilihat ketika masyarakat harus menaati peraturan lalu lintas, seperti penggunaan jembatan penyeberangan, tidak menghentikan mobil di tempat larangan, dan tidak bergelayutan di pintu-pintu bus dan angkutan kota hanya karena ingin mengejar jam kerja yang semakin mendesak.

Dalam berbagai kasus itu, terlihat bahwa pemerintah, sesungguhnya, telah mempunyai kehendak politis (*political will*) untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang dirasakan serba tidak teratur. Kesemrawutan di jalan serta pelanggaran lalu lintas, barangkali saja, adalah fenomena yang paling mudah ditangkap dari wujud perilaku ketidakdisiplinan masyarakat. Padahal, apabila ditelaah lebih lanjut, disiplin bukanlah sekedar sebatas kepatuhan pada polisi yang mempunyai otoritas untuk mengatur lalu lintas. Disiplin juga menjangkau pada persoalan-persoalan keseharian, seperti membuang sampah pada tempat yang tersedia, atau membayar pajak tepat pada waktunya sebagaimana yang ditentukan oleh pihak (institusi) penarik pajak. Selain itu, disiplin juga berkaitan dengan kejujuran seserang yang mempunyai otoritas pada sebuah lembaga pemerintah, seperti bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Munculnya berbagai persalan korupsi yang tercermin dalam kasus-kasus besar bagaimana ketidakjujuran beberapa oknum pejabat, sebenarnya, berawal dari persoalan disiplin tadi.

Apabila pemerintah sampai melakukan penegakan disiplin secara politis, ini sudah menandakan bahwa persoalan perilaku tidak disiplin sudah semakin serius untuk segera diperbaiki. Padahal apabila dikaji secara menyeluruh, perilaku tidak disiplin yang terlanjur menjadi budaya

yang dianggap mapan, pastilah terlalu sulit untuk diperbaiki. Artinya, untuk melakukan pendisiplinan pada mereka yang telah terlanjut tua akan menemukan banyak hambatan. Dalam hal ini, agaknya, harapan untuk melakukan pendisiplinan dapat dilakukan pada mereka yang masih berusia anak-anak. Asumsinya, bahwa anak-anak akan mudah patuh pada peraturan serta gampang memberikan penghukuman kepada mereka apabila melakukan perilaku anti-disiplin.

Persoalannya ternyata tidaklah semudah sebagaimana yang dibayangkan. Sejumlah kasus yang mencolok justru memperlihatkan bahwa anak-anak pun sudah dihindangi perilaku tidak disiplin. Sebagai misal, keterlambatan anak pada jam masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas rumah, dan bolos sekolah adalah beberapa kasus yang mewujudkan perilaku anti-disiplin anak. Bukan hanya itu kasus-kasus ketidakdisiplinan terjadi. Bahkan dalam pergaulan publik, terutama dalam penggunaan fasilitas-fasilitas umum, anak-anak pun mulai menunjukkan kecenderungan perilaku tidak berdisiplin. Contoh yang paling konkret dapat dilihat ketika mereka melakukan aksi corat-coret pada fasilitas umum, menggunakan toilet tanpa harus menyiram, atau merusak telepon umum, juga menerobos untuk mendapatkan tempat antre yang lebih depan.

Dengan melihat kondisi yang demikian ini, ada semacam pesimisme bahwa tidak mudah untuk menciptakan budaya disiplin pada kalangan anak sekalipun. Terlihat secara jelas anak-anak pun mempunyai kultur untuk tidak menghormati berbagai aturan baku yang telah ditetapkan oleh lembaga untuk melakukan kegiatan belajar, yaitu sekolah. Serta mereka pun dengan tanpa beban melakukan pelanggaran terhadap sejumlah konvensi masyarakat yang berupaya menciptakan keharmonisan. Perilaku permisif anak untuk melakukan tindak anti-disiplin sudah sedemikian mengejala, sehingga harapan yang diletakan untuk menanamkan perilaku disiplin pun menjadi semakin layak dipertanyakan. Apalagi jika sampai perilaku anti-disiplin anak ini berhasil membatin menjadi subkultur komunitas manusia, persoalannya akan menjadi semakin rumit.

B. Perumusan Masalah

Ada semacam asumsi yang kemudian diterima menjadi aksioma bahwa keluarga merupakan basis utama anak-anak untuk melakukan proses bekajar. Dalam kaitan ini, keluarga dianggap sebagai faktor yang menentukan pendidikan anak. Orang tua menjadi guru yang memiliki posisi sentral dalam mengarahkan bidang edukasi anak. Sementara itu, pendidikan formal yang terlaksana dalam bentuk proses belajar-mengajar dalam suatu lembaga sekolah, hanya sekedar ditempatkan sebagai nilai